



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 11 April 2020

Halaman: 11

► KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemkot Anggap Belum Perlu Terapkan PSBB

JOGJA—Sejumlah daerah yang memiliki tingkat kasus positif Corona tinggi telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menyikapi hal tersebut, Pemkot Jogja menilai Kota Jogja belum perlu ikut-ikutan menerapkan PSBB.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, menjelaskan sejumlah syarat yang tidak terpenuhi untuk menerapkan PSBB ini meliputi kasus Corona tidak besar, penyebaran tidak luas dan angka kematian tidak tinggi. "Kota Jogja tidak masuk kategori standar penerapan PSBB," ujarnya beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogja, pada kasus yang telah terkonfirmasi, ada enam kasus positif, tiga di antaranya masih dirawat, dua orang sembuh dan satu orang lagi meninggal dunia. Sementara pasien dalam pengawasan (PDP), hingga kini 18 kasus masih dalam pengawasan, 28 kasus sembuh dan enam kasus meninggal.

Adapun jumlah orang dalam pengawasan (ODP), saat ini total ada 406 orang, dengan kecamatan paling banyak yakni Umbulharjo sebanyak 98 kasus, disusul Gondokusuman sebanyak 51 kasus dan Kotagede sebanyak 44 kasus. "Semua kecamatan memiliki ODP," ucap dia.

Penerapan PSBB, kata Heroe, merupakan penilaian provinsi yang didasarkan pada kesepakatan Bupati dan Walikota. "Yang bisa kami lakukan saat ini penyarangan nama yang harus segera diisolasi. Manakala ada yang keluar-masuk, maka kendaraan juga harus menerapkan pembatasan fisik, yakni 50 persen baik bus maupun kendaraan pribadi," ujarnya.

Dia berharap masyarakat yang mudik memang disebabkan alasan mendesak sehingga mengharuskannya mudik. Selama masih bisa ditunda, dia meminta agar masyarakat bisa menunda dulu mudiknya.

Titik Perbatasan

Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja, Agus Arif Nugroho, menuturkan PSBB di Kota Jogja tidak terlalu diperlukan karena penyarangan kendaraan sudah dilakukan di perbatasan provinsi. "Pintu masuk utara di Kulonprogo, utara dan timur di Sleman, juga Gunungkidul," katanya.

Itulah sebabnya, Kota Jogja diakui dia akan lebih fokus memantau kedatangan kendaraan nonpribadi, yakni lewat terminal dan stasiun. Setiap kedatangan di kedua tempat ini dilakukan pengecekan suhu tubuh dan pencatatan tujuan. Dia memastikan pendatang tidak terlalu banyak, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, sekitar 58%-60% masyarakat Jabodetabek tidak mudik.

"KAI sudah memangkas perjalanan, bus juga tidak melayani pemudik. Kami tidak melarang, tetapi dari Organda sendiri pengin memutus penyebaran Covid-19 agar cepat selesai dan kembali beraktivitas seperti biasa," katanya.

(Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005